

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI
DANA DESA PADA KANTOR DESA TUNGKA
DI KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



**ZULFA INDAH LESTARI
105731118419**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI DANA
DESA PADA KANTOR DESA TUNGKA DI
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh :

ZULFA INDAH LESTARI

NIM : 105731118419

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya (Q.S. Al-Baqarah 286)

“Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang, kesukaran takluk pada orang yang sabar dan kekuatan mengiringi orang yang ikhlas”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah Swt Atas Ridho-Nya Serta Karuniahnya

Sehingga Skripsi Ini Telah Terlaksana Dengan Baik

Alhamdulillah Rabbil'amin

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Saya

Bapak Suardi Dan Ibu Nurlaila Yang Telah Senantiasa Memberikan

Doa Dan Dukungan Baik Moral Dan Moril Yang Takterhingga

PESAN DAN KESAN

“Orang yang hebat bukan dia yang mencapai keberhasilan dalam satu kali berusaha. Melainkan dia yang selalu bangkit dan tak pernah

putus asa”





PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa
Pada Kantor Desa Tingka Di Kabupaten Enrekang"

Nama Mahasiswa : Zulfaridan Lestari

No. Stanbuk / NIM : 105731110419

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diajukan di depan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing

Pembimbing II

Dr. Muh. Btm, SE, M.Si
NIDN. 0020996301

Nurul Fadada, S.Si, M.Si
NIDN. 0925118602

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844



PROGRAM STUDI ASKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Zulfa Indah Lestari, NIM : 105731118419 diterimadan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keterangan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0007/44-Y/32201/091004/2023, Tanggal 11 Muharram 1445 H / 29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H
29 Juli 2023 M.

PANITIA UJIAN

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua | Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wd.I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguj | 1. Amir, SE, M.Si, Ak, CA
2. Mira, SE, M.Ak, Ak
3. Syamsuddin, S.Pd, M.Ak
4. Basri Basir MR, SE, M.Ak |

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507



PROGRAM STUDI ASKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zulfa Indah Lestari
 Stambuk : 105731118419
 Jurusan : Akuntansi
 Dengan judul : "Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa
 Pada Kantor Desa Tungka Di Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa

*Skrripsi Yang Saya Ajukan Didepan Tim Penguji Adalah Asli Hasil Karya
 Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
 menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H

29 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

Zulfa Indah Lestari
 Zulfa Indah Lestari
 105731118419



Diketahui Oleh

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
 Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
 NBM : 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
 Mira, SE., M.Ak., Ak
 NBM :128 684

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini

Nama : Zulfah Indah Lestari
Nim : 105731118419
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa Pada Kantor Desa
Tungka Di Kabupaten Enrekang**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 11 Muharran 1445 H

29 Juni 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

Zulfah Indah Lestari
105731118419





KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa Pada Kantor Desa Tungka Di Kabupaten Enrekang”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Suardi dan Ibu Nurlaila yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, S.E., M.Ak. AK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muh. Rum, SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Nurul Fuada, S.ST., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 06 Juni 2023

Penulis

Zulfa Indah Lestari



ABSTRAK

ZULFA INDAH LESTARI. (2023). Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa Pada Kantor Desa Tungka Kabupaten Enrekang. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing Muh. Rum dan Nurul Fuada.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien dalam hal pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan negara dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem pengendalian internal untuk mengamankan Dana Desa di Dasa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil 3 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kaur Keuangan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian internal Dana Desa pada Kantor Desa Tungka dapat dikatakan efektif mengamankan Dana Desa karena dijalankan secara sehat berdasarkan satandar keuangan yang benar.

Kata Kunci : Sitem Pengendalian Internal, Akuntansi Desa Desa.



ABSTRACT

ZULFA INDAH LESTARI. (2023). Internal Control System of Village Fund Accounting at the Tungka Village Office of Enrekang Regency. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, supervised by Muh. Rum and Nurul Fuada.

The internal control system is a continuous process to achieve organizational goals through effective and efficient operational activities regarding financial reporting, protection of state wealth, and compliance with laws and regulations. This study aims to determine the internal control system's role in securing village funds in Village Tungka, Enrekang District, Enrekang Regency. This type of research is qualitative research. Interviews and documentation do the data collection method. This study took three respondents: the Village Head, Village Secretary, and Village Finance Officer. The results of this study show that the internal control system in the Village Fund at the Tungka Village Office effectively secures Village Funds because it is run healthily based on the correct financial standards.

Keywords: Internal Control System, Village Fund Accounting.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRCK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori	7
1. Sistem Pengendalian Internal	7
a. Tujuan Sistem Pengendalian Internal	8
b. Indikator Sistem Pengendalian Internal.....	10
c. Unsur Sistem Pengendalian Internal.....	18
d. Manfaat Sistem Pengendalian Internal	19
2. Akuntansi Dana Desa.....	20
a. Sistem Akuntansi Desa.....	21
b. Standar Akuntansi Pemerintah	22
c. Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa ...	23
d. Laporan Keuangan Desa	27
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Pikir.....	35

BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Situs Dan Waktu Penelitian.....	38
D. Jenis Dan Sumber Data.....	39
E. Informan.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Objek penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Analisis dan interpretasi.....	55
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tungka	44
Gambar 4.2 Otoritas Pemcairan Anggaran	49
Gambar 4.3 Sistem Akuntansi Desa	54



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tungka 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian	67
Lampiran 3 Balasan Izin Penelitian.....	68
Lampiran 4 Lembar Validasi Data Kualitatif	69
Lampiran 5 Lembar Validasi Abstrak	70
Lampiran 6 Lembar Hasil Turnitin Per-Bab	71
Lampiran 7 Biografi Penulis.....	77





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah desa sehingga pemerintahan mengutamakan penguatan keuangan desa. Desa adalah komunitas masyarakat yang mempunyai batas wilayah. Batas wilayah tersebut diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang wilayah pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Setiap desa memiliki dana desa yang digunakan oleh masing-masing pemerintah desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana desa dapat diukur dalam jumlah uang dan barang yang diperlukan untuk memenuhi hak dan kewajiban desa menurut (Devina Setiawan ,2019). Dana desa dipercayakan kepada lembaga desa dan dikelola dengan baik dan benar sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pentingnya pengawasan keuangan desa untuk memastikan ketepatan penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa harus diperhatikan prinsip yang mengikuti peraturan hukum dan pengelolaannya. Keuangan desa menurut (Taufik, n.d. 2018:10) harus dikelola dengan tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan, bertanggung jawan dan partisipan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan terbaik bagi masyarakat.

Belakangan ini marak terjadinya penyalahgunaan anggaran desa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan tersebut

terjadi kerugian besar bagi pemerintah daerah. Terjadinya penyalahgunaan keuangan umumnya diakibatkan oleh lemahnya pengendalian internal. Pengendalian internal yang lemah menurut (Sapitri & Alexandro, 2021) akan memungkinkan terjadinya kecurangan terkait pertanggungjawaban dana desa dan penyaluran dana desa. Oleh karena tingginya tingkat kecurangan dalam peredaran dana desa, maka diperlukan penerapan sistem akuntansi untuk mengamankan anggaran dana desa. Akuntabilitas publik merupakan alat ukur untuk meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah, akuntabilitas berlaku tidak hanya untuk pemerintah pusat saja tetapi juga pada tingkat daerah. Dengan penerapan sistem akuntansi yang baik maka besar kemungkinan dapat meminimalkan potensi risiko mengenai pengelolaan dana desa, meningkatkan efektivitas dan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa secara baik.

Enrekang merupakan wilayah yang cukup potensi pengembangan komoditas pertanian di Sulawesi Selatan. Pemerintahan ini memberi kontribusi perekonomian cukup tinggi yang bersumber dari hasil pertanian. Produksi pertanian di Kabupaten Enrekang yang paling dominan tanaman pangan yang meliputi biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Terkhusus di Desa Tungka masyarakat bersumber dari hasil bertani jagung. Dengan demikian Kabupaten Enrekang dapat memberikan kontribusi ekonomi secara nasional yang bersumber dari hasil pertanian selama seluruh anggaran dana desa digunakan tepat peruntukannya.

Penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Tungka Kabupaten Enrekang pada Tahun 2016 cukup menarik perhatian untuk diteliti. Diungkap oleh media massa tentang penyalahgunaan dana desa yang terjadi

di desa Tungka Kabupaten Enrekang yang terjadi pada tahun anggaran 2015 s/d Tahun 2017. Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Enrekang dan menetapkan dua tersangka pelaku korupsi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 492.191.200 (Putusan Mahkamah Agung, 2019:11). Melihat hal tersebut, diperlukan pelaporan keuangan yang akurat dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan keuangan desa.

Anggaran dana desa dapat diberikan dalam bentuk fisik maupun non-fisik, seperti dalam pembangunan infrastruktur yang dapat membantu perekonomian dengan ketentuan 30 persen dari dana dialokasikan untuk menjalankan kegiatan pemerintah desa dan 70 persen digunakan untuk memperluas pemberdayaan masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat di Desa Tungka bergantung pada pertanian untuk mempertahankan perekonomiannya maka dengan terealisasinya anggaran dana desa dengan baik maka dapat meningkatkan produksi hasil pertanian masyarakat dengan demikian memudahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sistem pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka organisasi tersebut akan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya sistem pengendalian internal maka tujuan-tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai secara efektif dan efisien. Karena semakin besar organisasi maka sistem pengendalian internalnya pun akan semakin penting.

Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penyelewengan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Berhubungan dengan semakin maraknya permasalahan mengenai penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran kas maka dari itu kita membutuhkan adanya pengendalian internal agar bisa dengan mudah dapat menemukan atau menganalisis permasalahan permasalahan yang ada atau mungkin permasalahan yang ada akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa diketahui secara jelas. Sistem pengendalian internal dapat dikatakan efektif mengamankan Dana Desa apabila dijalankan secara sehat berdasarkan satandar keuangan yang benar.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk mencegah penyalagunaan dana desa di Kabupaten Enrekang melalui penguatan sistem pengendalian internal. Terlaksananya pengendalian internal yang baik dan efisien menurut (Kummer dkk 2015) maka laporan keuangan yang akuntabel, kepatuhan terhadap peraturan maka efesiensi operasional dapat dilaksanakan. Kualitas pengendalian yang baik menurut (Wijayanti & Hanafi, 2018:341) mengurangi keinginan perangkat desa untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Seseorang dengan moral yang tinggi dan mekanisme pengendalian internal yang efektif lebih kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan bahkan dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, Aparatur pemerintahan saat ini masi dalam kondisi memprihatinkan menurut (Sidik *et al*, 2002) khususnya dalam pengelolaan

keuangan daerah. Penanganan dana desa belum dipahami dengan baik oleh perangkat desa menurut (Ismail *et al*, 2016:335) yang berdasarkan permendagri 113 tahun 2014. Hal ini dipengaruhi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya operasional dan kepemimpinan. Namun, aparat desa berusaha meningkatkan kualitas pengolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat.

Sehubungan dengan keadaan ini peneliti menganggap perlunya penelitian tambahan yang dapat menawarkan perbaikan untuk masalah saat ini. Hal ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pihak aparat desa karena ketidakmampuan mereka mengelolah keuangan desa, mereka harus berurusan dengan penegak hukum.

Urgensi penelitian ini ialah untuk melihat peran sistem pengendalian internal untuk mengamankan dana desa, sehingga peneliti akan mengungkap peran aktif dalam keuangan Desa Tungka Kabupaten Enrekang.

Pengendalian internal pada akuntansi keuangan yang lemah memungkinkan terjadinya penyalagunaan anggaran dana desa dengan mudah maka dari permasalahan tersebut penulis mengangkat dalam bentuk penelitian dengan judul "Sistem Pengendalian Internal Pada Akuntansi Dana Desa Di Desa Tungka Kabupaten Enrekang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumusan masalah yaitu bagaimana peran sistem pengendalian internal untuk

mengamankan Dana Desa di Desa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sistem pengendalian internal untuk mengamankan dana desa di Dasa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat dan kegunaan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis melalui mekanisme pengendalian internal akuntansi terhadap keuangan desa di Desa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan desa untuk mengamankan aset desa.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini dapat menjadi titik awal penelitian untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam mengelola keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien dalam hal pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan negara dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Sistem pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2016:129) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi mendorong produktivitas dan efisiensi dengan mendorong kepatuhan terhadap bisnis.

Sistem pengendalian internal menurut (Sugiono, 2021) adalah seperangkat kebijakan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien, resiko diidentifikasi dan dikelola dengan baik, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dipenuhi, serta keandalan informasi dijaga dengan baik. Pengendalian internal menurut teori akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi teknologi informasi dan sumber daya manusia.

Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penyelewengan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Berhubungan dengan semakin maraknya permasalahan mengenai penyelewengan dan

penyalahgunaan wewenang dalam operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran kas maka dari itu kita membutuhkan adanya pengendalian internal agar bisa dengan mudah dapat menemukan atau menganalisis permasalahan permasalahan yang ada atau mungkin permasalahan yang ada akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa diketahui secara jelas. Sistem pengendalian internal dapat dikatakan efektif mengamankan Dana Desa apabila dijalankan secara sehat berdasarkan standar keuangan yang benar.

a. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Suatu organisasi atau perusahaan memerlukan pengendalian yang efektif dan efisien karena dengan adanya sistem pengendalian diharapkan dapat memastikan bahwa segala sesuatu yang diputuskan telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan sistem pengendalian internal menurut (R.Martini, 2019) untuk :

1) Pemeliharaan Aset Organisasi

Aset fisik organisasi rentan terjadi pencurian, penyalagunaan dan terjadi kerusakan karena kecelakaan jika tidak dilindungi secara memadai oleh sistem hukum. Begitu pula dengan aset tidak berwujud seperti piutang akan rentan di salagunakan jika dokumentasi dan catatan pentingnya tidak selalu dijaga dengan baik.

2) Mengecek verifikasi kebenaran dan kelengkapan data akuntansi

Manajemen membutuhkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya karena data akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan penting. Pengendalian internal

diberlakukan untuk memastikan bahwa pemrosesan pengolahan data akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang benar dan dapat diandalkan karena data akuntansi mewakili perubahan aset sebuah organisasi.

3) Meningkatkan kinerja

Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari ketidak efisiensinya sumber data organisasi dengan mencegah duplikasi atau penerobosan dalam semua operasi organisasi.

4) Mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Manajemen menciptakan aturan dan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama penendalian internal ini untuk menjamin sepenuhnya bahwa pekerja mematuhi arahan manajemen.

Sistem informasi akuntansi yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pengendalian internal karena dapat membantu aset organisasi dengan melakukan pencatatan aset yang baik dan akurat. Jika struktur pengendalian internal tidak memadai, maka akan timbul kesalahan, ketidak akuratan dan kerugian yang kemungkinan besar.

Berdasarkan tujuannya diatas ada dua macam sistem pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2018) yaitu :

a) Internal Akuntansi (*Internal Accounting Control*)

Merupakan komponen dari sistem pengendalian internal, yang juga terdiri dari prosedur, struktur organisasi dan tindakan

terkoordinasi untuk melindungi kebenaran dan keandalan data akuntansi serta dapat mengamankan aset organisasi.

b) Pengendalian Internal Administratif (*Internal Administratif Control*)

Komponen sistem pengendalian internal yang juga mencakup tindakan terkoordinir, struktur organisasi dan prosedur untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar manajemen.

b. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Indikator pengendalian internal Menurut (COSO) *Committee of Sponsoeing Organization of the Tread way Commission* dalam (Utomo, 2019) terdiri dari :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian sebagai seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan lingkungan pengendalian, orang-orang dengan karakteristik seperti integritas, moral, etika dan lingkungan tempat kerja merupakan inti dari sebuah perusahaan. Ini adalah hal-hal yang mendorong organisasi maju dan berfungsi sebagai landasan dimana segala sesuatu dibangun. Lingkungan pengendalian terdiri dari :

- a) Integritas dan nilai etika organisasi
- b) Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya
- c) Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab

- d) Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten
- e) Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal. Selanjutnya, COSO (2013:7) menyatakan, bahwa terdapat 5 (Lima) prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu :

1. Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
2. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
3. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan.
4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan
5. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

2) Penaksiran

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dikelola oleh organisasi.

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 4 (empat) prinsip yang mendukung penialain risiko dalam organisasi yaitu :

1. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penialain risiko yang berkaitan dengan tujuan.
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Organisasi memepertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

Penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

1. Perubahan dalam lingkungan operasi.
2. Personil yang baru.
3. Sistem informasi yang baru atau berubah.
4. Pertumbuhan yang cepat.
5. Teknologi baru
6. Lini, produk, atau aktivitas yang baru.
7. Restrukturisasi korporat.
8. Operasi luar negeri.
9. Pengumuman/ Pernyataan akuntansi.

Mengadopsi prinsi-prinsip akuntansi yang baru atau prinsip-prinsip akuntansi yang berubah dapat mempengaruhi risiko yang tersangkut dalam penyiapan laporan keuangan.

3) Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, presentasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.

COSO (2013:7) menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.
2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
3. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

Jenis pengendalian aktivitas menurut Azhar Susanto (2013:99) diantaranya yaitu :

1. Prosedur otorisasi

Prosedur ini dibuat untuk memeberikan otorisasi (kewenangan) kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi. Prosedur otorisasi sangat

tergantung kepada otorisasi apa yang akan dilakukan. Ada dua macam otorisasi yang diberikan oleh manajemen, yaitu :

Otorisasi umum, berkaitan dengan transaksi secara keseluruhan. Otorisasi umum menggambarkan kondisi dimana karyawan mengawali, mencatat, memproses satu jenis transaksi. Ketika kondisi tertentu terpenuhi karyawan

diberi otorisasi (wewenang) untuk melakukan transaksi tanpa terlebih dahulu harus berkonsultasi.

Otorisasi khusus, diterapkan hanya kepada jenis transaksi tertentu. Manajemen umumnya memerlukan otorisasi khusus untuk transaksi yang jumlahnya besar atau transaksi yang berpotensi menimbulkan penyelewengan. Sebelum karyawan mengawali transaksi tertentu yang telah ditentukan, karyawan harus berkonsultasi dulu kepada manajemen untuk memperoleh persetujuan melakukan transaksi.

2. Mengamankan aset dan catatannya

Pengamanan aset dan catatannya ini meliputi keamanan fisik dan kepastian tanggung jawab. Keamanan fisik, Menerapkan prosedur tertentu untuk memberikan keamanan secara fisik pada persediaan, uang tunai, tanah, gedung-gedung, peralatan, dan catatan yang berkaitan dengan aset, Kepastian tanggung jawab, Manajemen memberi tanggung jawab untuk melindungi aset dan data tertentu kepada karyawan. Jika terjadi suatu penyimpangan manajemen akan meminta karyawan tersebut untuk bertanggung jawab.

3. Pemisahan fungsi

Manajemen dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan harus menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dan kepada orang lain.

Pemisahan ini akan mengurangi kesempatan kepada karyawan untuk melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan selama melaksanakan tugasnya. Tugas yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk otorisasi melakukan transaksi, mencatat transaksi, dan memelihara posisi aset.

4. Catatan dan dokumentasi yang memadai

Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi akuntansi yang terjadi telah dicatat dengan tepat.

4) Aktivitas Pengendalian

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu :

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal
2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

Indikator-indikator dan informasi dan komunikasi terdiri dari :

- a) Eksistensi, yang menunjukkan apakah angka-angka yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan.
- b) Kelengkapan, merupakan angka-angka transaksi yang seharusnya dimasukkan dan diikuti sertakan secara lengkap serta mempertimbangkan materialitas dan biaya.
- c) Akurasi, yakni mengacu kepada jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.
- d) Klasifikasi, bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal telah diklasifikasikan dengan tepat.
- e) Tepat waktu, dimana pencatatan transaksi dicatat pada tanggal yang tepat.

- f) Posting, pengikhtisaran, di mana transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.

5) Pengawasan

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

c. Unsur sistem pengendalian internal

Pengendalian internal memiliki 4 unsur menurut (Mulyadi, 2017:130) berikut gambaran dari unsur sistem pengendalian internal yaitu :

- 1) Struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan tanggung jawab dan wewenang.

Kerangka kerja untuk mengalokasikan tanggung jawab fungsional di antara bagian-bagian operasi yang terlibat dalam unit organisasi.

2) Sistem otoritas dan prosedur pencatatan

Setiap transaksi dalam organisasi terjadi semata-mata di bawah kuasa seorang atasan yang berwenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengontrol pembagian wewenang untuk melaksanakan setiap transaksi.

3) Praktik yang sehat

Jika tidak ada jaminan praktik yang baik dalam pelaksanaan sebuah organisasi maka pembagian tanggungjawab fungsional, sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan berjalan dengan efisien.

4) Kualitas karyawan yang sepadan dengan tanggung jawabnya

Komponen penting dari sistem pengendalian adalah faktor kualitas karyawan. Aspek pengendalian lainnya dapat ditekan seminimal mungkin jika organisasi tersebut kompeten dan jujur serta tetap mampu menghasilkan akuntabilitas keuangan yang dapat dipercaya.

d. Manfaat Sistem Pengendalian Internal

Adapun manfaat sistem pengendalian internal sebagai berikut :

- 1) Melindungi aset yang digunakan oleh pemerintah.
- 2) Informasi akurat.
- 3) Karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4) Menjaga aset dari pencurian, penipuan, penyalagunaan atau kehilangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian internal, dengan demikian pengendalian internal ini memiliki peran penting untuk mecegah ataupun pendeteksi tindakan kecurangan.

2. Akuntansi Dana Desa

Dalam rangka memberikan informasi berupa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perangkat desa maka diperlukan akuntansi dana desa. Akuntansi dana desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dilakukan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni 2020).

Pemerintah desa diharapkan sanggup meningkat dalam perihal pembangunan serta menambah pemanfaatan sumber daya yang ada supaya tiap desa tidak tertinggal di masa modern di saat ini. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan anggaran dana desa, ada akibat yang besar baik kesalahan administratif ataupun kesalahan substantif. pelaporan, dan tanggungjawab keuangan. Ini tidak lumayan, anggaran yang diperoleh dari bermacam sumber anggaran provinsi serta kabupaten (APBN dan APBD) memiliki banyak resiko, sehingga pengelolaan dana desa wajib transparan, akuntabel serta tidak disalahgunakan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan pedesaan yaitu anggaran pembangunan yang disediakan dalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes) guna pembangunan pedesaan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang dialokasikan dalam Kelompok Transfer Desa. Dengan demikian masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana desa ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemerdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana seharusnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aparat desa yang belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah harus menjalankan Sistem Akuntansi bukan hanya sebagai sistem pengendali proses transaksi keuangan melainkan harus menjadi suatu pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dari tujuan suatu organisasi tersebut, dengan diterapkannya sistem akuntansi sangatlah berguna untuk mendukung pemerintahan baik daerah ataupun kota, sehingga pemerintahan desa mudah dalam melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban kepada pemerintahan di kabupaten. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu, masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah desa dan yang berhubungan dengan desa.

a. Sistem Akuntansi Desa

Sistem akuntansi yang mendukung tercapainya tujuan organisasi sekaligus sebagai alat pengendalian transaksi keuangan sangat diperlukan oleh pemerintahan. Sistem akuntansi menurut (Mulyadi,

2016) adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan sebuah organisasi dan transaksi dicatat menggunakan formulir atau dokumen. Sistem akuntansi adalah seperangkat proses manual dan terkomputerisasi yang dimulai dengan pengumpulan data, pendokumentasian, pengiktisatan dan pelaporan status keuangan pemerintahan dan operasi keuangan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

b. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah sebelumnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengamanatkan penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, menjadi landasan bagi standar akuntansi pemerintah sebelumnya. Standar tersebut merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Sistem akuntansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, telah berubah dari sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menjadi akrual setelah diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2019. Standar akuntansi pemerintahan menurut (Erwinton Putra *at al*, 2013:30) merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah agar lebih terstruktur, terukur dan dapat diperbandingkan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Manfaat yang dapat diambil dalam penerapan standar akuntansi pemerintah ini adalah terwujudnya informasi laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Akuntabilitas meliputi upaya untuk meningkatkan penelolaan keuangan pemerintah maupun pengungkapan informasi keuangan kepada publik sehingga mereka dapat menilai akuntabilitas pemerintah atas operasi yang dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memperoleh peningkatan kualitas laporan keuangan.

c. **Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan konsep tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas dan ketertiban serta terorganisir dan disiplin anggaran guna mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa berlangsung 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun prinsip tata kelolah keuangan menurut (Devina Setiawan ,2019). desa yaitu sebagai berikut :

1) **Transparansi**

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan publik mengetahui dan memiliki akses seluas-luasnya terhadap informasi keuangan. Setiap orang berhak mengakses informasi tentang bagaimana pemerintahan berjalan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkannya. Transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintah, yakni informasi

tentang kebijakan, prosedur pembuatan dan pelaksanaannya, sampai dengan hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah untuk menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat bahwa pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah perlu menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan adanya transparansi kecurangan yang terjadi sulit untuk disembunyikan. Oleh karena itu,

transparansi menjadi sangat penting dan dapat melindungi uang rakyat dari tindakan kecurangan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi kepada orang yang berhak atau berwenang untuk mencari serta menjelaskan kinerja dan tindakan hukum yang mengelola organisasi. Berikut yang harus diperhatikan saat melaksanakan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah menurut (Devina Setiawan, 2019), yaitu :

- a) Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang akuntabel harus mendapat dukungan dari pimpinan dan seluruh staf.
- b) Harus ada sistem yang dapat menunjang sumber daya dan hukum yang berlaku.
- c) Harus dapat menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai.
- d) Harus berfokus pada pencapaian visi misi serta hasil dan kauntungan yang diwujudkan.
- e) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai bentuk pemutaakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan keuangan.

3) Partisipasi

Partisipan adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri NO. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Gagasan tanggungjawab aparat pemerintah desa lebih cepat terpenuhi berkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik, kebebasan berserikat, berbicara dan berpartisipasi adalah landasan partisipasi. Keterlibatan publik dalam penganggaran sangat penting untuk mencegah tindakan yang tidak baik.

Berikut adalah beberapa pedoman dan langkah-langkah untuk partisipasi penganggaran :

- a) Adanya akses keterlibatan publik yang aktif dalam perencanaan anggaran dan program.
- b) Adanya peraturan undang-undang yang memungkinkan memungkinkan lembaga otonom, serta masyarakat secara keseluruhan, melakukan kontrol sebagai sarana *check and balances*.

- c) Sikap proaktif pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan warga dalam proses swasta.

Hal ini mengingat adanya kesenjangan antara pengetahuan masyarakat tentang partisipasi efektif dan keinginan mereka untuk mewujudkan anggaran pendapatan belanja daerah yang aspiratif.

d. Laporan keuangan desa

Laporan keuangan menurut (Sulfiani 2018) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Tahap pendampingan laporan keuangan desa menurut (Devina Setiawan ,2019). sebagai berikut :

- 1) Apabila anggaran dibuat buatlah rencana berdasarkan pernyataan visi dan misi.
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendanaan, pengeluaran dan pendapatan. Anggaran selanjutnya harus dilaksanakan setelah menerima persetujuan.
- 3) Transaksi yang terjadi selama pelaksanaan anggaran perlu didokumentasikan secara lengkap dengan membuat buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak dan buku persediaan yang mencakup kumpulan data transaksi. harus dicatat lengkap dalam bentuk pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris yang didalamnya termasuk kumpulan bukti-bukti transaksi.

- 4) Berdasarkan transaksi yang dilakukan dengan tujuan mempelajari keadaan keuangan, neraca dapat dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang situasi keuangan.
- 5) Selain membuat perimbangan pertanggungjawaban anggaran dibuatlah, juga dibuat laporan realisasi anggaran desa.

Basis kas laporan realisasi anggaran untuk pengakuan, pengeluaran dan pembiayaan sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana diangkut berdasarkan akrual di neraca. Laporan-laporan yang harus dibuat dalam pembukuan dan pengeluaran keuangan desa menurut (Zai, 2019) adalah :

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)

Anggaran desa merupakan sebuah rencana keuangan tahunan desa yang berbentuk angka yang disusun secara metodis yang telah disetujui pemerintah desa dalam masa waktu setahun sekali.

b) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran, baik kredit maupun tunai, serta aktivitas perbankan atau masalah akuntansi. Nama lain dari buku kas umum adalah buku dokumentasi.

c) Buku Kas Harian

Buku ini digunakan untuk mencatat transaksi yang melibatkan pengeluaran dan laba terkait kas.

d) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu bendaharaan umum mengenai pendapatan dan pengeluaran yang melibatkan bank.

e) Buku Pajak

Buku membantu bendaharaan umum untuk penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan pajak.

f) Buku Inventaris Desa

Barang milik desa dicantumkan dalam buku inventaris yang merupakan alat bantu untuk buku kas umum.

g) Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan habis pakai yang diperlukan desa.

h) Buku Modal

Buku modal atau ekuitas dana digunakan untuk mencatat dana dan hibah yang mengalir ke desa.

i) Buku Piutang

Buku piutang sebuah buku yang digunakan untuk mencatat piutang lokal. Piutang adalah kekayaan milik desa yang dihasilkan dari perjanjian jual beli atau sewa usaha yang dimana orang atau badan usaha melakukan pembayaran secara kredit.

j) Buku Hutang atau Kewajiban

Buku hutang atau kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

k) Neraca

Neraca adalah dokumen yang merinci situasi keuangan desa pada titik waktu tertentu. Neraca merinci aset, kewajiban dan transaksi dana modal desa selama satu periode.

l) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berbasis Standar Profesional Akuntansi Publik menampilkan pendapatan akrual, pengeluaran, surplus, defisit dan pembiayaan yang masing-masing periode anggaran dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan ini dilaporkan minimal sekali dalam satu tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Marniati Ale, Ibrahim Ahmad, Rostiaty Yunus (2020) berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Simbuang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan dana desa di Desa Simbuang, ditetapkan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Pelaksanaan dana desa ditetapkan sesuai aturan pemerintah Tana Toraja, yaitu 70 persen untuk pekerjaan fisik dan 30 persen untuk dana operasional. Semua pengerjaan di kerjakan secara Swakelola oleh masyarakat. Untuk pengelolaan keuangan desa di Desa Simbuang, diatur oleh Bendahara Desa. Dan melaporkan pertanggungjawaban ke pada kepala desa setelah selesai pengerjaan item kegiatan. Pelaporan dana desa di laporkan pada akhir semester, laporan dalam bentuk tertulis di tujukan kepada Badan Permusyawaratan Lembang, Camat Simbuang, Bagian Keuangan pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan

Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang. Dan laporan akhir tahun yang merupakan rangkuman dari semua laporan semester.

Pertanggungjawaban dana di desa simbuang, akan disampaikan pada akhir tahun. Pertanggungjawaban ini di tujukan kepada Badan Permusyawaratan Lembang, Camat Simbuang, Bagian Keuangan pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang, Bupati Tana Toraja, dan BAPPEDA Tana Toraja. Laporan ini selain sebagai persyaratan untuk pencairan dana tahun berikutnya, juga sebagai syarat untuk kepala desa yang akan maju sebagai calon periode berikut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat di berikan penulis adalah sebagai berikut: 1) Untuk Pemerintah Desa Simbuang agar kiranya rutin melakukan pembinaan bagi perangkat desa agar lebih memahami langkah-langkah penyusunan, pelaporan, dan pembukuan dana desa. 2) Untuk pembaca, agar kiranya dapat memahami aturan dan pedoman penggunaan dana desa, untuk membantu pemerintah menjadi pengawas dana desa di daerah masing-masing. Dalam melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala desa setelah pengerjaan item kegiatan. Laporan ini selain persyaratan untuk pencairan dana tahun berikutnya, juga sebagai syarat untuk kepala desa yang akan maju sebagai calon periode berikutnya (Alle *et al.*, 2020).

Penelitian Retno Murni Sari (2020) berjudul "Internal Control Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah menerapkan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa dan melaksanakan pembangunan desa dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, transparan dan akuntabel, serta mengajak masyarakat desa untuk ikut serta dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa (Sari, 2020).

Penelitian Ahmad Sumarlan, Lulu Saputri (2020) berjudul “Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talanga Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Talanga Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma telah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pengelolaan dana desa yang ditetapkan pemerintah, namun demikian, terdapat beberapa sublaporan dan dokumentasi yang strukturnya berbeda dengan keputusan pemerintah. Masalah pelaporan dengan sistem akuntansi keuangan dana desa mungkin menjadi penyebabnya. Hambatan terbesar untuk membuat pelaporan keuangan desa adalah kurangnya akuntan yang berkualitas atau kurangnya sumber daya (Sumarlan & Saputri, 2020).

Penelitian Resti Wahyuni Maulidya (2020) berjudul “Penerapan Perencanaan Dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi)”. Penelitian merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Citanglar, Desa Jagamuku dan Desa Buniwangi memiliki sistem perencanaan dan pengendalian internal untuk mengelolah alokasi dana desa dan sistem tersebut berjalan dengan baik (Maulidah, 2020).

Penelitian Felicilia Aurelia Hadiluwarsi, Kezya Audela, Ika Kristianti (2021) berjudul “Analisi Sistem Pengendalian Internal Pembangunan Sistem Informasi Desa”. Penelitian merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pengendalian pada Desa Kemajuan masi lemah. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak kontrol yang diterapkan, jelas dari temuan analisi bahwa kontrol tersebut belum dilaksanakan seefektif yang seharusnya. Hal ini karena pengendalian internal tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pedoman tertulis, peningkatan dan pemeliharaan hanya dilakukan setahun sekali, tidak ada perlindungan sistem tambahan dan sumber daya manusia yang tidal mencukupi (Fathia & Indriani, 2022).

Penelitian Andriani, Tatik Zulaika (2021) berjudul “Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolan Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa serta pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menerapkan prinsip akuntabilitas. Namun, masi perlu adanya bimbingan lebih lanjut karena tidak sempenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rindorindo *et al.*, 2021).

Penelitian Hariatih, Sukardi (2021) berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi di Desa Ntoke Kecamatan Were Kabupaten Bima). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemerintahan Desa Ntoke mengikuti proses yang sesuai dengan sistem pelaporan kauangan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam

penyampaian laporan keuangan desa. Pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan prosedur pelaporan keuangan desa, meskipun masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa karena sistem yang digunakan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan, (2) Tanggung jawab keuangan daerah melalui standar akuntansi. Standar ini belum diberlakukan dalam pelaporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban karena laporan pertanggungjawaban analisis anggaran Desa Ntok hanya berupa laporan tahunan yang merinci realisasi anggaran (Hadiluwarsa *et al.*, 2021).

Penelitian Masri Ayu Ndururu dan Eduar Baene (2022) berjudul “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanote Kabupaten Nias Selatan)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan Permendagri No. 113/2015, permasalahan utama adalah ketidaktahuan kepala desa dan jajarannya dalam pengelolaan keuangan desa (Ndruru & Baene, 2022).

Penelitian Mohammad Akbar Hakiki, Syarif Hidayat (2022) berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam pemerintahan Desa Berbek sebagian besar sudah sesuai dengan indikator. Mengenai pendekatan kompetensi dikatakan sesuai berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan akuntabilitas

pemertintah Desa Berbek belum sesuai dengan teori dan belum tepat pengelolaan alokasi dana desanya (Hakiki & Hidayat, 2022).

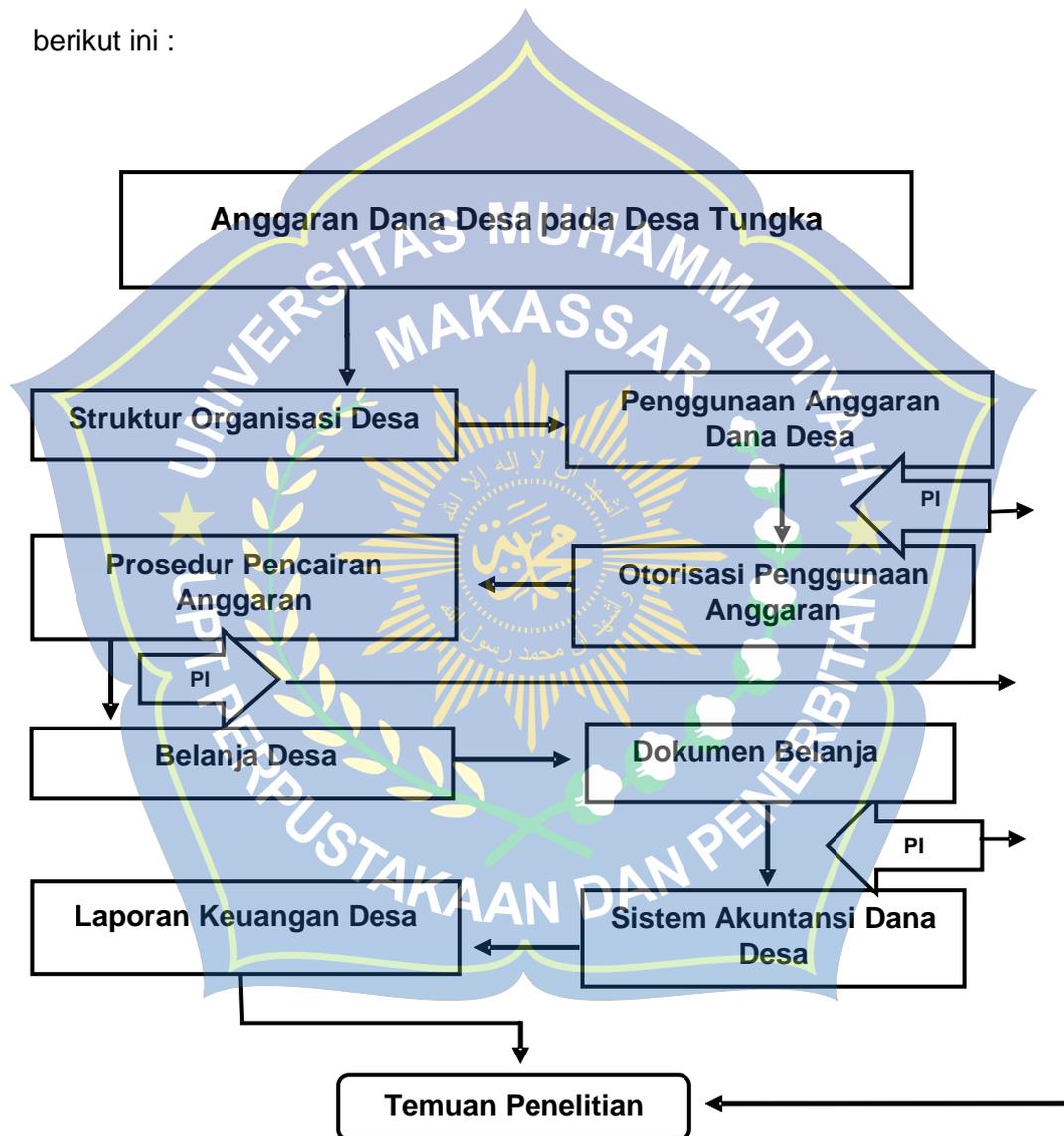
Penelitian Ardianus Laia, Aferiaman Telaumbanua, Agnes Renositin Harefa (2022) berjudul “Analisis Pengolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan desa di Desa Angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, telah dilakukan dengan baik dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam beradaptasi, kehadiran dan keterlibatan masyarakat selalu mewarnai setiap proses pengelolaan keuangan desa yang sudah sesuai dengan rencana kebijakan pemerintah, agar pengelolaan keuangan yang dikucurkan ke desa benar-benar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Akuntansi et al., 2022).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah utama. Berikut uraian penjelasan kerangka pikir.

Anggaran dana desa yang berasal dari Desa Tungka dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi sehingga penggunaan anggaran Dana desa ini dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi tersebut, pada saat penggunaan anggaran maka terjadi internal kontrol kemudian internal kontrol dilakukan otorisasi penggunaan anggaran untuk melakukan prosedur pencairan anggaran, pada saat prosedur pemcairan anggaran terjadi maka dilakukan pengawasan terhadap belanja desa yaitu dalam bentuk pembuktian dokumen, dokumen belanja ini didalamnya dilakukan

pengawasan terhadap sistem akuntansi desa sebelum diterbitkannya laporan keuangan desa, dari proses tersebut kita dapat menemukan temuan penelitian dari masing-masing pengawasan internal kantor. Dengan demikian gambar kerangka pikir dalam penelitian ini adalah seperti yang disajikan berikut ini :



PI = Pengendalian Internal

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode deskriptif secara kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiono, 2019:195-205) adalah metode yang didasarkan pada filsafat post positif yang digunakan penelitian untuk mempelajari konsep objek yang alami, yang sebagai instrument penting dan teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi (kombinasi) data analisis bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada peran sistem pengendalian internal pada keuangan dana desa pada Kantor Desa Tungka Kabupaten Enrekang dan penelitian ini difokuskan pada laporan realisasi anggaran dana Desa Tungka tahun anggaran 2020.

C. Situs Dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian dilaksanakan di Desa Tungka Kabupaten Enrekang yang mencakup tentang peran sistem pengendalian internal pada keuangan dana desa pada Kantor Desa Tungka. Tempat penelitian adalah tempat dimana mengumpulkan keadaan terkini dari objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Jadi survei dilakukan selama dua bulan dari bulan Maret sampai bulan Mei 2023 di Kantor Desa Tungka Kabupaten Enrekang.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari pengumpulan berbagai informasi dan fakta melalui mewawancarai pegawai Kantor Desa Tungka.

2. Data Sekunder

Data atau sebuah informasi yang diperoleh melalui review buku, artikel dan sumber terbitan lainnya tentang sistem pengendalian internal akuntansi dana desa.

E. Informan

Dalam penelitian kualitatif diperlukan pemilihan Informan, informan merupakan suatu subjek yang dapat memberikan sebuah informasi tentang sebuah organisasi untuk menjadi sumber data mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan informan yang pilih oleh peneliti yaitu :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Kepala urusan keuangan

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam memulai penelitian ada beberapa tahap yaitu :

1. Wawancara Langsung

Dengan metode wawancara ini, penulis secara pribadi melibatkan sejumlah karyawan yang terlibat dalam pengumpulan data dan memastikan bahwa data yang diperoleh tersebut sudah akurat dan dapat diandalkan.

2. Observasi Lapangan

Mengamati pengumpulan data dan sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Desa Tungka. Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan dan untuk memberikan informasi latar belakang untuk penelitian selanjutnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara disalin dan dicatat guna mendapatkan data sekunder untuk penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang diadopsi dari instrumen penelitian dengan menggunakan teknik transkrip dokumentasi dan wawancara. Dengan ini peneliti dapat memperoleh sebuah data kualitatif dan Informasi melalui wawancara dan teknik observasi kemudian mendeskripsikan dalam bentuk deskriptif secara praktis sebagai tanggapan atas kejadian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah-satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari Endeg yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama "ENREKANG" versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil \pm 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar bernama Malepong Bulan. Kerajaan ini kemudian bersifat Manurung (terdiri dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "Pitue Massenrempulu", yaitu :

1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'

4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'
7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Kabupaten Enrekang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja.

Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu.

Sebelah Timur: Kabupaten Sidrap.

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang.

Terografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji, dan lain-lain. Visi Dan Misi Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

Wilayah Kabupaten Enrekang beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21°–32 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini

berkisar antara 77%–83%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Enrekang cenderung tinggi sepanjang tahun dan curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.300–2.900 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun.

a. Visi Kabupaten Enrekang

“Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) Yang Berkelanjutan Dan Religius”

b. Misi Kabupaten Enrekang

1. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan infrastruktur pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan infastruktur pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya asing, penguasaan teknologi, bermoral dan berimtaq.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi gender.
5. Meningkatkan skla usaha ekonomi kerakyatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri.
6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

2. Gambaran Umum Desa Tungka

Desa Tungka merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang berlokasi di sebelah Barat Kabupaten Pinrang, sebelah Timur Kelurahan Puserren, sebelah Utara Desa Temban dan sebelah Selatan Desa Cemba. Desa Tungka terdiri dari 4 Dusun yaitu sebagai berikut :

Dusun Balimbonga, Dusun Lembang, Dusun Galung, Dusun Tapuan

Adapun jumlah penduduk Desa Tungka berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tungka

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	KK	Total
1.	Balimbongan	167	134	87	301
2.	Lembang	231	197	116	428
3.	Galung	308	274	138	582
4.	Tapuan	208	175	91	383
Jumlah		914	780	432	1694

Keadaan iklim di Desa Tungka terdiri dari musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba, adapun mata penvarian masyarakat Desa Tungka sangatlah bervariasi akan tetapi sebagian besar berprofesi sebagai petani jangung dan peternak sapi dan disamping itu sebagaimana pula berprofesi pedagang, buruh dan PNS. Adapun kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tungka ialah seratus persen beragama islam.

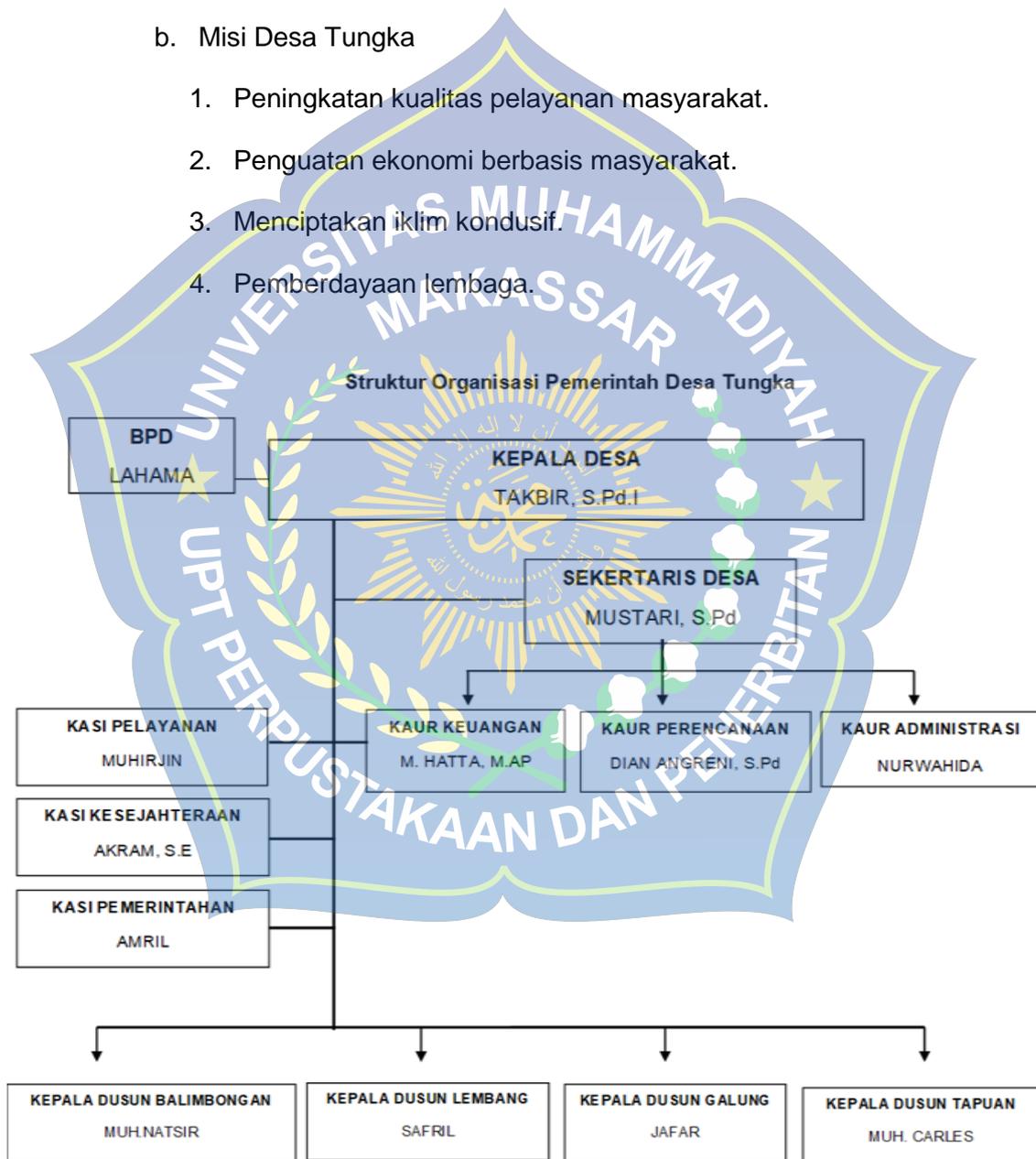
VISI Dan Misi Desa Tungka

a. Visi Desa Tungka

“Meningkatkan sumber daya masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa tungka”.

b. Misi Desa Tungka

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
2. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
3. Menciptakan iklim kondusif.
4. Pemberdayaan lembaga.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tungka

Tugas Kepala Desa

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Tugas Sekertari Desa

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas Kepala Urusan

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas Kepala Seksi

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Tugas Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun

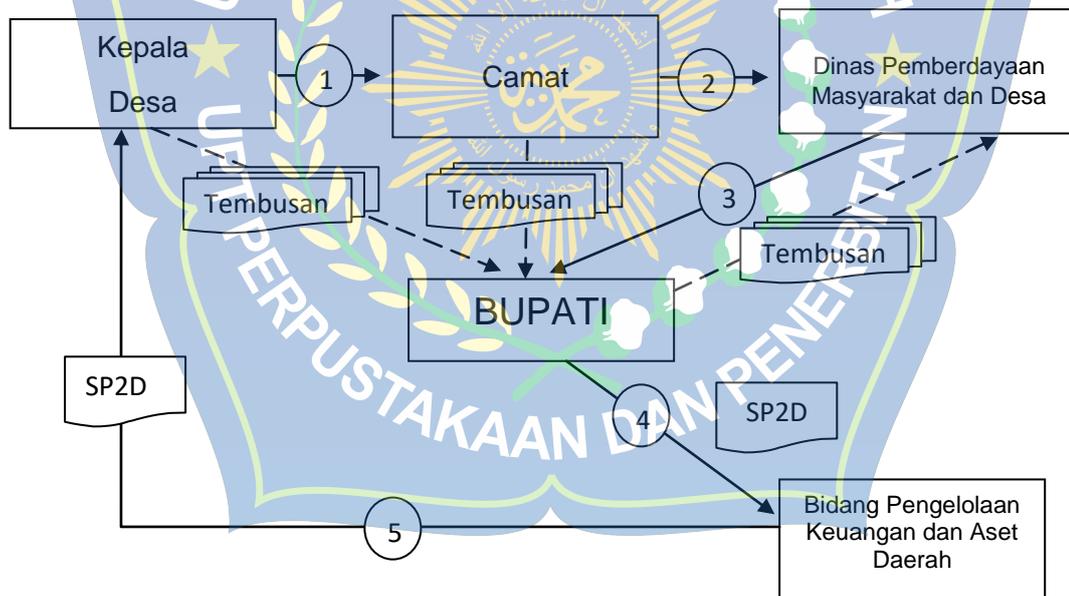
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengendalian Internal

Gambaran Otoritas Pencairan Anggaran Dana Desa Tungka Kabupaten Enrekang sebagai berikut :



Gambar 4.2 Otoritas Pencairan Anggaran

Berikut uraian dari otoritas pencairan anggaran dana desa

1. Proses otoritas pencairan anggaran dana yaitu, Kepala Desa mengusulkan permohonan dana desa, sebelum kepala desa menyampaikan permohonan persetujuan pencairan Dana Desa

kepada camat pemohon melengkapi berkas persyaratan pencairan Dana Desa sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan dana desa yang ditandatangani kepala desa
 - b. Fotocopy peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB)
 - c. Rencana penggunaan anggaran dana desa tahap I (20 persen), Tahap II (40 persen) dan Tahap III (40 persen) yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa.
 - d. Fotocopy buku rekening yang beratas namakan pemerintah yang ditandatangani oleh kepala kepala Urusan Keuangan.
2. Setelah Camat menyetujui surat rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Bupati yang ditebuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan surat rekomendasi pencairan Dana Desa ditebus kepada kepada Bupati.
 4. Bupati melungeluarkan surat persetujuan pencairan dana yang ditebuskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menerbitkan surat persetujuan pencairan dana.
 5. Setelah terbit surat persetujuan pencairan Dana Desa maka sudah dapat dilaksanakan proses pemindahan Dana Desa rekening ke rekening kas desa, setelah Dana Desa sudah ada direkening desa pemerintah desa sudah bisa melakukan pengalokasian dana desa

sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan

Kepala Desa Tungka Kabupaten Enrekang :

“Setiap penarikan keputusan selalu ada yang menjadi tolak ukur apa yang mesti diberikan dana maka dari itu setiap dari keputusan tersebut ada laporan pertanggungjawaban yang akan dilakukan.” (1, takbir, Kepala Desa)

Pencairan anggaran Dana Desa atau proses pencairan dana di Bank ini dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di desa dengan ini Kepala Desa biasa mengintruksikan kepada kaur keuangan apabila ada pencairan yang akan dilakukan di Bank sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Tungka Kabupaten Enrekang :

“Fungsi Desa yang dilibatkan dalam menangani setiap pencairan ada dua yaitu Kepala Desa dan kaur keuangan jadi ketika ada anggaran yang akan dikeluarkan maka Kepala Desa mengintruksikan kepada kaur keuangan melakukan pencairan dengan pengambilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan anggaran yang ada.”(1, Takbir, Kepala Desa)

Begitu pula dengan semua kegiatan transaksi yang akan dilakukan di Desa harus sepengetahuan dari Kepala Desa katena tanpa sepengetahuan dari epala Desa transaksi tidak bisa dilaksanakan seperti yang dikatakan Kepala Desa Tungka

Kabupaten Enrekang :

“Dalam melaksanakan sebuah transaksi perlu mendapatkan persetujuan dari sebuah atasan walaupun ini adalah bentuk dari kegiatan atau tugas dari kaur keuangan akan tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa pengetahuan atau tanpa tanda tangan dari seorang kepala desa.(1, Takbir, Kepala Desa)”

Ditambahkan lagi oleh Sekertaris Desa Tungka Kabupaten

Enrekang :

“Setiap kegiatan atau setiap transaksi yang akan dilaksanakan harus sepengetahuan dari atasan sehingga kita bisa melakukan transaksi-transaksi yang ada di desa terutama yang terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa tersebut”.(2, Mustari, Sekertaris Desa)

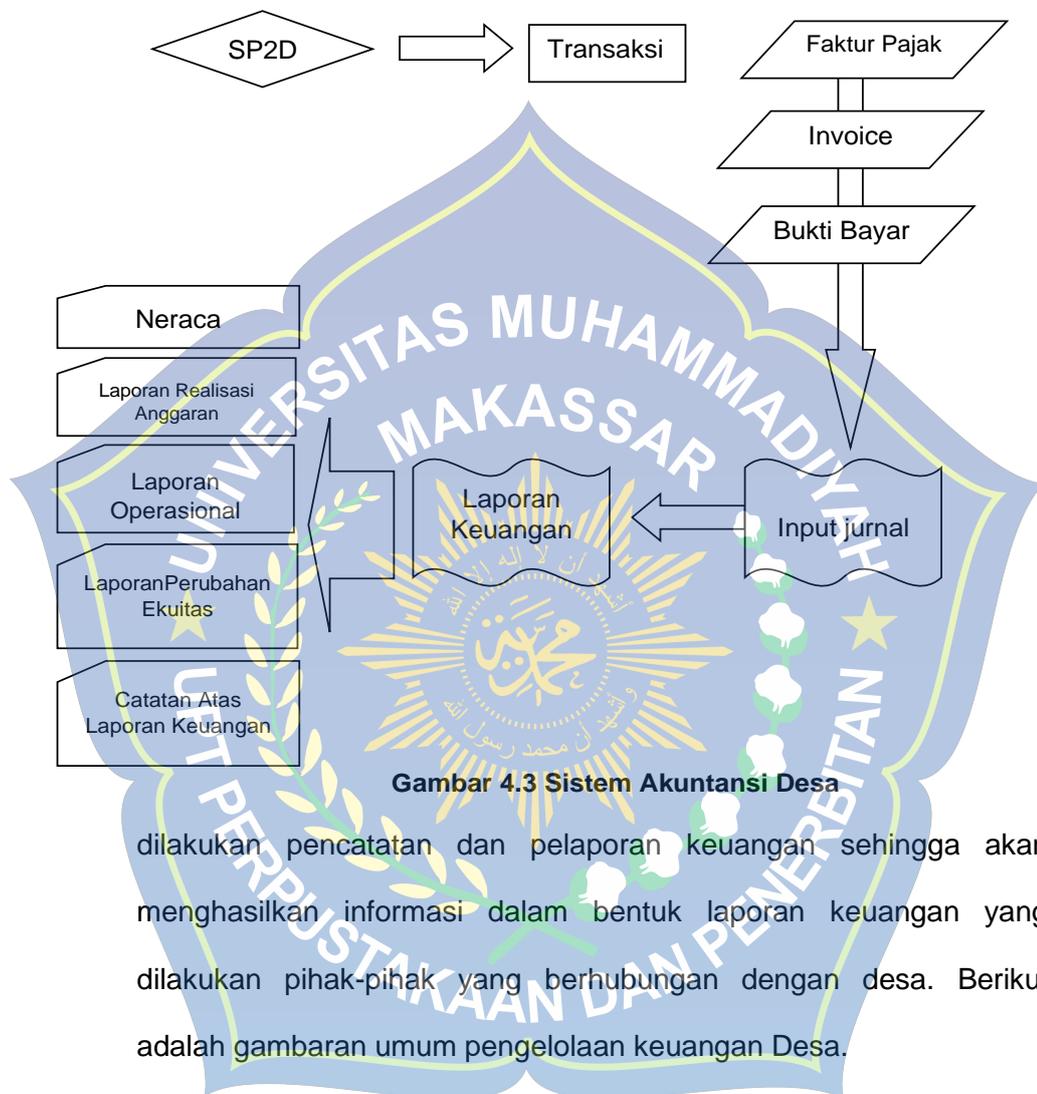
Dengan demikian tidak sembarangan staf pemerintahan Desa yang dapat melakukan pencairan Dana Desa dan melaksanakan proses transaksi ini menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan dengan baik proses pengaman Dana Desa yang ada di dalam Kantor Desa Tungka dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Sistem Akuntansi Dana Desa

Desa setiap tahun menerima dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana Desa yang diterima ini tidak sama nilainya. Didalam pencairan anggaran Dana Desa ada tiga tahapan didalamnya yaitu Tahap pertama sebesar 20 persen, Tahap ke dua sebesar 40 persen dan Tahap ke tiga yaitu sebesar 40 persen maka dari itu dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa ini tergantung dari kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RAB) dan proses pengelollan ini pula selalu didampingi oleh instansi yang terkait dengan pemerintah Desa. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Tungka Kabupaten Enrekang :

“Pengelolaan dana desa ini selalu didampingi baik dari masyarakat dan instansi yang terkait adapun peran masyarakat disini untuk ikut serta didalam perencanaan pembangunan desa kedepannya artinya setiap kegiatan keuangan selalu mendapatkan dampingan dan ketika terdapat masalah selalu di reviu dan diberikan penjelasan”.(1, Takbir, Kepala Desa)

Akuntansi Dana Desa ini terdapat didalamnya proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian



dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dilakukan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Berikut adalah gambaran umum pengelolaan keuangan Desa.

Setelah terbit surat pencairan dana desa (SP2D) maka dilaksanakan proses transaksi, sebelum melakukan sebuah transaksi perlunya persetujuan dari Kepala Desa selaku pemegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan Desa. Pada kantor Desa Tunga ini sudah diterapkan hal ini seperti yang dijelaskan Kepala Desa Tunga Kabupaten Enrekang :

“Dalam melaksanakan sebuah transaksi perlu mendapatkan persetujuan dari sebuah atasan walaupun ini adalah bentuk dari kegiatan atau tugas dari kaur keuangan akan tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa pengetahuan atau tanpatanda tangan dari seorang kepala desa.”(1,Takbir, Kepala Desa)

Proses transaksi ini pula perlu melakukan pencocokan antara rencana pembelian barang dengan bukti fisik barang yang dibeli, seperti yang dikatakan Kaur Keuangan Desa Tungka Kabupaten Enrekang :

“Itu harus memang dicocokkan karena harus sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) dengan apa yang telah dimusyawarahkan bersama.” (3, Muh.Hatta, Kaur keuangan)

Didalam proses transaksi perlu dibuktikan dengan Faktur Pajak, Invoice dan Bukti Bayayar. Faktur Pajak ini yang diberikan oleh pengusaha kena pajak sebagai bukti telah dilakukannya sebuah transaksi sedangkan Invoice sebuah dokumen yang diterima dari penjual barang sebagai bukti telah dilaksanakannya transaksi pembelian, dan Bukti Bayar ini dibuktikan dengan nota-nota bayar, sturuk pembelian beserta kuitansi. Dengan adanya bukti-bukti ini mempermudah untuk pembuatan laporan keuangan sesuai akuntansi yang berlaku di pemerintah desa.

Penerbitan Laporan Keuangan ini terdapat didalamnya sebuah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan Desa tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas apa-apa saja yang telah dilaksanakan di Desa dan laporan keuangan ini dilaksanakan setiap

periodik, seperti yang dikatakan Kaur Keuangan Kantor Desa Tungka Kabupaten Enrekang :

“Dalam setiap kegiatan perlu dibuat laporan periodik sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan tersebut dan Dibuat pula secara berganda untuk ditebus kebeberapa fungsi desa.”(3, Muh. Hatta, Kaur Keuangan)

Laporan keuangannya pun di buat secara berganda untuk ditebuskan kepada instansi yang berkaitan dengan pemerintah desa dengan demikian dalam proses pengelolaan akuntansi di Desa sudah diawasi baik oleh pemerintahan yang berkaitan dengan Desa maka sulit lagi terjadi sebuah kecurangan didalamnya.

C. Analisis dan Interpretasi

Berdasarkan peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian internal proses berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal yang terjadi pada kantor Desa Tungka Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan satandar keuangan yang benar. Pemanfaat proses otoritas pencairan anggaran Dana Desa mulai dari pengajuan permohonan, persetujuan Dana Desa sampai dengan pencatatan kas ke buku rekening kas desa selalu diperiksa, diawasi, dan didampingi oleh instansi yang berwenang dengan adanya pengawasan dari instansi maka sulit lagi terjadi kecurangan.

Indikator sistem pengendalian internal menurut (COSO) *Committee of Sponsoeing Organization of the Tread way Commissing* yang sudah diterapkan pada Kantor Desa Tungka Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Seperti yang diterapkan ada kantor Desa Tungka di segala kegiatan dalam bentuk tugas dan tanggungjawab dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi yang ada di desa dengan demikian sudah jelas lingkungan pengendalian yang diterapkan pada kantor Desa Tungka dilaksanakan dengan baik.

2. Penakasiran

Selalu ada yang menjadi tolak ukur tolak ukur dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada Kantor Desa Tungka apalagi dalam pengalokasian Dana Desa ini bertujuan untuk memaksimalkan pengalokasian Dana Desa tersebut untuk menghindari risiko yang ada.

3. Informasi dan Komunikasi

Infomasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Pada Kantor Desa Tungka selalu dilaksanakan komunikasi yang baik antara atasan dan staf-staf yang ada dikantor dan ini dilakukan secara terus-menerus.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian ini sudah diterapkan pada Kantor desa Tungka karen adalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi meliputi otoritas, verifikasi, analisis dan prestasi kerja diterapkan dengan baik guna menjaga harta organisasi dan pemisahan fungsi

5. Pengawasan

Kegiatan ini meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dan memastikan apakah semuanya

dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Aktifitas pengawasan ini sudah diterapkan dengan baik di Kantor Desa Tunga karena setiap kegiatan laporan pertanggungjawabannya selalu diperiksa, diawasi, dan didampingi oleh instansi yang berwenang terhadap pemerintah desa dengan dilakukannya pemantauan dan pengawasan ini maka sulit lagi terjadi sebuah kecurangan.

Akuntansi yang baik yaitu yang mematuhi standar akuntansi yang berlaku dalam pemerintah dengan demikian Laporan keuangan Desa sangat penting untuk dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas apa-apa saja yang telah dilaksanakan, laporan keuangan yang disajikan dalam sistem akuntansi keuangan pada Kantor Desa Tunga Kabupaten Enrekang sudah dapat dikatakan sudah sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku karena laporan keuangan Desa tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas apa-apa saja yang telah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Riset dan penelitian dan pembahasan Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa Pada Kantor Desa Tungka di Kabupaten Enrekeng dapat dikatakan efektif mengamankan Dana Desa karena dijalankan secara sehat berdasarkan standar keuangan yang benar.

Pemanfaat proses otoritas pencairan anggaran dana desa mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencatatan kas ke buku rekening kas desa selalu diperiksa, diawasi, dan didampingi oleh instansi yang berwenang terhadap pemerintah desa, dengan dilakukannya pengawasan tersebut maka sulit lagi terjadi kecurangan didalam pengelolaan keuangan Desa. Sistem akuntansi yang dilaksanakan pada Kantor Desa Tungka ini sudah mengamankan Dana Desa yang dikelola sesuai dengan sistem akuntansi yang lazim digunakan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bahwa pengamanan keuangan Dana Desa dapat diamankan jika dijalankan dengan sistem akuntansi yang sehat.
2. Secara kebijakan penelitian ini menyarankan kepada kepala desa dan staf kantor desa bahwa keamanan keuangan dana desa

sebaiknya dijalankan dengan prinsip sistem akuntansi yang sehat agar menyajikan laporan keuangan tepat waktu dan transparansi.

3. Secara metodologis untuk mengembangkan intensi keamanan dana desa, maka dapat dikembangkan melalui penelitian dokumentasi dan kualitas laporan keuangan serta berujung pada akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Ekonomi, M. D. A. N., Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha*. 1(2), 312–319.
- Alle, M., Ahmad, I. H., & Yunus, R. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Simbuang. *Accounting Journal*, 01(03), 317–323. <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/369><http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/download/369/348>
- Daerah, D. A. N., Yang, D., Pada, M., & Nasional, T. (2002). *FORMAT HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT*. April, 17–18.
- Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastia Nurtanzila. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29–45.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten / Kota Provinsi Aceh). 4, 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Hadiluwarsa, F. A., Audela, K., & Kristianti, I. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengembangan Sistem Informasi Desa. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 88–101. <https://doi.org/10.24246/jms.v2i12021p88-101>
- Hakiki, M. A., & Hidayat, S. (2022). 772-Article Text-2618-1-10-20220123. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 1–8.
- Ismail, M., Kuncara Widagdo, A., & Widodo, A. (n.d.). *SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA*.
- Maulidah, R. W. (2020). Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 2014–2017. <https://doi.org/10.18196/jati.030123>
- Ndruru, M. A., & Baene, E. (2022). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan)*. 1(2), 275–285.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Pd, S. S., & Cami, B. (2019).
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Sapitri, S., & Alexandro, R. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.30737/me diasosian.v5i2.1786>
- Sari, R. M. (2020). Internal Control Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan ...*, 11(2), 212–232. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/1962><https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/download/1962/1734>
- Sumarlan, A., & Saputri, L. (2020). Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma

- Barat Kabupaten Seluma. (*JEMS*) *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains*, 1(1), 53–68. <https://doi.org/10.36085/jems.v1i1.620>
- Taufik, T. (n.d.). *PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). *Pada pemerintahan desa*. 331–345.
- Zai, K. S. T. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen PEMBNAS* ..., 22–34. <http://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/download/74/26>
- Setyawati, Deograsias, Ferdinand. (2019). Akuntansi Dana Desa
- Fifi Sulfiani. (2018), Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
- Martini, (2019), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akuntansi*
- Kummer, Singh, K., & Best, P. (2015). *The effectiveness of fraud detection instruments in not-for-profit organizations*. *Managerial Auditing Journal*, 30(4/5), 435-455
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123
- Mulyadi 2018 . *Akuntansi Biaya*. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Utomo , A (2019). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada PDAM* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.



Lampiran 1

“Pedoman Wawancara”

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa Pada Kantor Desa Tungka Di Kabupaten Enrekang”.

1. Nama Informan : Takbir, S.Pd.I (T)
Jabatan : Kepala Desa
2. Nama Informan : Mustari, S.Pd (M)
Jabatan : Sekertaris Desa
3. Nama Informan : M. Hatta, M.AP (MH)
Jabatan : Kuar Keuangan

NO	Pertanyaan	Coding
1.	Apakah sistem pengendalian internal pada kantor desa Tungka sudah berjalan secara efektif ?	T dan M
2.	Apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Tungka sudah sesuai dengan akuntansi yang berlaku ?	T, M dan MH
3.	Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Tungka Kabupaten Enrekang ?	T dan M
4.	Berapakah fungsi desa yang dilibatkan dalam menangani setiap transaksi yang dilaksanakan ?	T, M dan MH
5.	Apakah ada persetujuan dari atasan dalam setiap melaksanakan sebuah transaksi ?	T, M dan MH
6.	Apakah laporan pertanggungjawaban umumnya sudah dilaksanakan tepat waktu ?	T, M dan MH
7.	Apakah apatar desa membuat bukti transaksi ?	MH
8.	Apakah bukti transaksi dibuat secara berganda untuk ditembuskan pada berbagai fungsi desa ?	MH
9.	Apakah barang yang dibeli dicocokkan antara rencana pembelian dengan buktri fisik barang ?	MH
10.	Apakah dibuat laporan periodik setiap kegiatan ?	MH

TRANSKIP WAWANCARA

NO	CODING	TRANSKIP
1.	T	Iya, Sudah sesuai dengan peraturan yang diberikan pemerintah desa karena di Desa Tungka sudah di atur oleh instansi yang terkait, dan pengendalian internal yang diterapkan pada kantor desa sudah berjakan secara efektif.
	M	Sistem pengendalian internal yang diterapkan di kantor desa sudah efektif.
2.	T	Pengelolaan dana desa ini selalu didampingi baik dari masyarakat dan instansi yang terkait adapun peran masyarakat disini untuk ikut serta didalam perencanaan pembangunan desa kedepannya artinya setiap kegiatan keuangan selalu mendapatkan dampingan dan ketika terdapat masalah selalu di reviu dan diberikan penjelasan dengan demikian sesuai dengan akuntansi dan sistem-sistem yang diterapkan oleh pemerintah Desa.
	M	Seperti yang dijalankan sekarang di kantor Desa Tungka sudah sesuai dengan akuntansi yang berlaku.
	MH	Sudah tidak ada lagi masalah dalam melakukan pengelolaan akuntansi di desa karena memang sudah ada format akuntansinya dan sudah menggunakan aplikasi SisKeudes.
3.	T	Setiap penarikan keputusan selalu ada yang menjadi tolak ukur apa yang mesti diberikan dana maka dari itu setiap dari keputusan tersebut ada laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh bendahara desa untuk di pertanggungjawabkan dalam setiap pengelolaan dana desa di Desa Tungka.
	M	Untuk melakukan sebuah kegiatan kita harus melakukan permohonan pencairan untuk mencairkan dana desa tersebut dan setiap selesai pekerjaan kita akan membuat laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang di laksanakan di Desa.

4.	T	Fungsi desa yang dilibatkan dalam menangani setiap pencairan ada dua yaitu kepala desa dan kaur keuangan jadi ketika ada anggaran yang akan dikeluarkan maka kepala desa mengintruksikan kepada kaur keuangan melakukan pencairan dengan pengambilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan anggaran yang ada.
	M	Ada beberapa fungsi desa yang dilibatkan dalam menangani setiap transaksi yaitu kepala desa, BPD, apatar desa, tim pelaksana kegiatan dan apara pekerja di lapangan.
	MH	Fungsi desa yang dilibatkan untuk menarik dana di bank hanya ada dua yaitu kepala desa dan bendahara desa, akan tetapi kalau melaksanakan transaksi belanja ada lima yaitu kepala desa, kaur/kasi TPK, masyarakat dan penyedia (toko tempat pembelian barang-barang).
5.	T	Dalam melaksanakan sebuah transaksi perlu mendapatkan persetujuan dari sebuah atasan walaupun ini adalah bentuk dari kegiatan atau tugas dari kaur keuangan akan tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa pengetahuan atau tanpa tanda tangan dari seorang kepala desa.
	M	Setiap kegiatan atau setiap transaksi yang akan dilaksanakan harus sepengetahuan dari atasan sehingga kita bisa melakukan transaksi-transaksi yang ada di desa terutama yang terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa tersebut.
	MH	Harus ada persetujuan dari atasan karena tanpa adanya persetujuan dari atasan kita tidak bisa menarik dana ataukah melakukan sebuah transaksi.
6.	T	Laporan pertanggungjawaban sudah harus dilaksanakan tepat waktu karena pemerintah desa juga didesak dari beberapa instansi, jadi apa yang ditransaksikan ataukah apa yang telah diberikan dana harus diselesaikan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan waktu yang telah dirumuskan sebelumnya.
	M	Laporan pertanggungjawaban ini tidak bisa di pungkiri, karena kadang dilaksanakan tepat waktu, kadang juga terlambat mengingat administrasi

		kadang belum lengkap untuk di input.
	MH	Laporan pertanggungjawaban ini sudah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan
7.	MH	Membuat bukti transaksi itu wajib dibuat laporannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban.
8.	MH	Dibuat pula secara berganda untuk ditebus kebeberapa fungsi desa.
9.	MH	Itu harus memang dicocokkan karena harus sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan bersama.
10.	MH	Dalam setiap kegiatan perlu dibuat laporan periodik sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Proses Wawancara Bersama Pak Takbir, S.Pd.I (Kepala Desa Tungka)



Proses Wawancara Bersama Pak Mustari S.Pd (Sekertaris Desa Tungka)



Proses Wawancara Bersama Pak M. Hatta, M.AP (Kaur Desa Tungka)



Lampiran 2

“Surat Permohonan Izin Penelitian”

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 886/05/C.4-VIII/III/1444/2023 21 Sya'ban 1444 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 13 March 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 309/05/A.2-II/III/44/2023 tanggal 13 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ZULFA INDAH LESTARI
No. Stambuk : 10573 1118419
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI DANA DESA PADA KANTOR DESA TUNGA DI KABUPATEN ENREKANG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2023 s/d 17 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

Lampiran 3

“Jawaban Permohonan Penelitian”



Lampiran 4

“Lembar Validasi Data Kualitatif”



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI

PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA		ZULFA INDAH LESTARI		
NIM		105731118419		
PROGRAM STUDI		Manajemen		
JUDUL SKRIPSI		SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI DANA DESA PADA KANTOR DESA TUNGKA DI KABUPATEN ENREKANG		
NAMA PEMBIMBING 1		Dr. Muh. Rum, SE.,M.Si		
NAMA PEMBIMBING 2		Nurul Fuada, S.ST., M.Si		
NAMA VALIDATOR		Aulia, S.IP., M.Si.M.		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	22/6/2023	Sebaiknya dalam melakukan wawancara, peneliti dapat lebih menggali informasi dari informan agar pembahasan penelitian jauh lebih menarik dan mendapatkan informasi yang maksimal	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	22/6/2023	Diskusikan dengan pembimbing	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	22/6/2023	Sebaiknya dilampirkan hasil uji keabsahan data	
4	Hasil deskripsi penelitian	22/6/2023	Konsultasikan dengan pembimbing	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	22/6/2023	Diskusikan dengan pembimbing	
6	Hasil analisis	22/6/2023	Diskusikan dengan pembimbing	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

Lampiran 5
“Lembar Validasi Abstrak”



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA	Zulfa Indah Lestari			
NIM	105731118419			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Dana Desa Pada Kantor Desa Tungka Di Kabupaten Enrekang			
NAMA PEMBIMBING 1	DR. Muh. Rum, SE., M.Si			
NAMA PEMBIMBING 2	Nurul Fuada, S.ST., M.Si			
NAMA VALIDATOR	Dr. Andi Mappatambo, S.E., M.M.			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	22 Juni 2023		

**Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*

Lampiran 6

“Lembar Hasil Turnitin Per-Bab”

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp:(0411) 866972,881593, Fax:(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Zulfa Indah Lestari
NIM : 105731118419
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	3 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Juni 2023
Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nassimah Hafid, M.I.P
NBM. 064591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB 1 Zulfa Indah Lestari 105731118419

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upi.edu Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 20%



BAB 2 Zulfa Indah Lestari 105731118419

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	2%
4	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	2%
5	journal.upgris.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uir.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB 3 Zulfa Indah Lestari 105731118419

ORIGINALITY REPORT

10 %	10 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%
★ etd.unsyiah.ac.id
Internet Source

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off



BAB 4 Zulfa Indah Lestari 105731118419

ORIGINALITY REPORT

8%	6%	5%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%
★ peraturan.bpk.go.id
Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%



BAB 5 Zulfa Indah Lestari 105731118419

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ eprints.umm.ac.id

Internet Source



Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Lampiran 7

“Biografi Penulis”



Zulfa Indah Lestari, panggilan Zulfa atau Indah lahir di Tungka, 19 Oktober 2001 dari pasangan suami istri Bapak Suardi dan Ibu Nurlaila. Peneliti adalah anak pertama dari 3 saudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang di tempun oleh peneliti yaitu SD Negeri 37 Tungka lulus pada tahun 2013, MTs Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang lulus tahun 2016, SMA Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang lulus tahun 2019 dan mulai tahun 2019 mendaftar dan kuliah pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.